

FENOMENOLOGI KOMUNIKASI PEMIMPIN ADAT DALAM PENETAPAN STATUS ORANG ASLI PAPUA DI KAMPUNG GAMTA RAJA AMPAT

Muhammad Syeh Alqadry

Universitas Trunodjoyo Madura
alqadriadi12@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Published : 07 June 2026

Keywords

Komunikasi Adat, Fenomenologi Komunikasi, Pemimpin Adat, OAP, Legitimasi Sosial

Customary Communication, Communication Phenomenology, Traditional Leadership, Indigenous Papuans, Social Legitimacy



© Author(s) 2026
 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengalaman komunikasi pemimpin adat dalam penetapan status Orang Asli Papua (OAP) di Kampung Gamta, Raja Ampat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif fenomenologi untuk menyingkap makna pengalaman subjektif pemimpin adat dalam praktik komunikasi adat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi dengan teknik purposive sampling, serta dianalisis melalui tahapan reduksi fenomenologis guna menemukan esensi pengalaman komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi adat dalam penetapan status OAP tidak sekadar merupakan proses informasional, melainkan praktik sosial yang sarat makna dan berakar pada dimensi kultural, genealogis, dan moral. Proses tersebut merepresentasikan integrasi antara pengetahuan genealogis, otoritas adat, dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga legitimasi identitas masyarakat. Selain itu, komunikasi adat berfungsi sebagai mekanisme utama dalam memverifikasi keabsahan status OAP, sekaligus sebagai sarana reproduksi legitimasi sosial, penguatan otoritas pemimpin adat, dan pemeliharaan kohesi sosial dalam masyarakat Kampung Gamta.

This study aims to critically examine the communication experiences of traditional leaders in determining the status of Indigenous Papuans (Orang Asli Papua/OAP) in Gamta Village, Raja Ampat. This research employs a qualitative approach with a phenomenological perspective to explore the meaning of subjective experiences of traditional leaders in customary communication practices. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation using purposive sampling techniques, and analyzed through phenomenological reduction to identify the essence of communication experiences. The findings reveal that customary communication in determining OAP status is not merely an informational process, but a socially meaningful practice rooted in cultural, genealogical, and moral dimensions. This process reflects the integration of genealogical knowledge, traditional authority, and collective responsibility in maintaining the legitimacy of community identity. Furthermore, customary communication functions as a primary mechanism for verifying the validity of OAP status, while simultaneously reproducing social legitimacy, strengthening traditional leadership authority, and maintaining social cohesion within the Gamta community.

PENDAHULUAN

Penetapan status Orang Asli Papua (OAP) merupakan isu strategis yang berada pada persimpangan dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat Papua. Status tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penanda identitas kultural, tetapi juga menjadi dasar dalam distribusi kebijakan afirmatif yang dirancang untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat asli Papua. Dalam kerangka otonomi khusus, pengakuan terhadap status OAP berkaitan erat dengan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, serta representasi politik, sehingga menjadikan proses penetapannya sebagai persoalan yang kompleks dan multidimensional.¹ Kajian mengenai Papua juga menunjukkan bahwa persoalan identitas dan kebijakan afirmatif tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan dan marginalisasi masyarakat lokal.²

Dalam praktiknya, penetapan status OAP menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan validitas data administratif dan potensi penyalahgunaan status oleh individu non-OAP. Butt³ mengungkapkan bahwa kebijakan afirmatif di Papua membuka peluang terjadinya manipulasi identitas, khususnya dalam konteks akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa identitas tidak bersifat statis, melainkan dapat mengalami negosiasi dalam konteks sosial dan politik. Dalam konteks Indonesia, penelitian mengenai identitas dan kebijakan publik juga menunjukkan adanya kecenderungan instrumentalitas identitas dalam praktik birokrasi.⁴

Dalam konteks tersebut, lembaga adat memiliki peran sentral sebagai institusi yang menjaga dan memverifikasi identitas kultural masyarakat Papua. Sistem kekerabatan, sejarah genealogis, serta pengakuan kolektif komunitas menjadi dasar utama dalam menentukan keaslian identitas seseorang. Koentjaraningrat⁵ menegaskan bahwa dalam masyarakat tradisional, sistem nilai budaya berfungsi sebagai mekanisme pengatur yang menjaga legitimasi sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Geertz⁶ yang melihat budaya sebagai sistem makna yang diwariskan secara simbolik. Penelitian mengenai masyarakat adat di Indonesia juga menunjukkan bahwa lembaga adat masih memiliki posisi penting dalam menjaga struktur sosial dan identitas kolektif.⁷

Secara empiris, praktik penetapan status OAP di Kampung Gamta, Raja Ampat, dilaksanakan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh pemimpin adat Jojau sebagai otoritas utama dalam struktur sosial lokal. Dalam proses ini, pemimpin adat tidak hanya bertindak sebagai

¹ Widjojo, *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*.

² Timmer, "A Brief Social and Political History of Papua, 1962–2004"; Widjojo, *Papua Road Map II: Dinamika Otonomi Khusus Papua*.

³ Butt, "Papuan Papuans? The Politics of Identity and Affirmative Action in Papua."

⁴ Davidson, "Politics-as-Usual on Trial: Regional Anti-Corruption Campaigns in Indonesia."

⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*.

⁶ Geertz, *The Interpretation of Cultures*.

⁷ Li, "Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot"; Acciaioli, "Grounds of Conflict, Idioms of Harmony."

pengambil keputusan, tetapi juga sebagai aktor komunikatif yang mengelola interaksi sosial, menafsirkan informasi genealogis, serta membangun konsensus kolektif. Peran ini menunjukkan bahwa komunikasi adat memiliki posisi yang fundamental dalam proses penetapan status OAP, karena menjadi medium utama dalam menyampaikan, menegosiasikan, dan memvalidasi informasi yang berkaitan dengan identitas individu.

Komunikasi dalam konteks adat tidak dapat dipahami sebagai proses linear yang sekadar mentransmisikan pesan. Sebaliknya, komunikasi merupakan praktik sosial yang sarat makna dan dipengaruhi oleh pengalaman subjektif individu dalam konteks sosial tertentu. Perspektif fenomenologi memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk memahami fenomena ini. Schutz⁸ menyatakan bahwa tindakan sosial berakar pada pemaknaan subjektif yang dibentuk melalui pengalaman hidup individu. Dalam kajian komunikasi, pendekatan fenomenologi menempatkan komunikasi sebagai proses interpretatif yang melibatkan kesadaran dan interaksi sosial.⁹ Dalam konteks komunikasi budaya, praktik komunikasi lokal juga dipahami sebagai bagian dari pengalaman sosial yang membentuk makna dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰

Lebih lanjut, komunikasi adat dalam penetapan status OAP juga berkaitan erat dengan proses konstruksi realitas sosial. Berger dan Luckmann¹¹ menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam konteks ini, legitimasi status OAP tidak hanya ditentukan oleh fakta objektif, tetapi juga oleh kesepakatan sosial yang dibangun melalui komunikasi. Proses tersebut melibatkan integrasi antara pengetahuan genealogis, otoritas adat, serta nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga menghasilkan sistem legitimasi yang diakui secara kolektif oleh masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek terkait identitas, komunikasi, dan masyarakat adat. Widjojo et al.¹² menyoroti dinamika sosial-politik Papua dalam konteks otonomi khusus. Butt¹³ mengkaji implikasi kebijakan afirmatif terhadap praktik sosial di Papua. Sementara itu, Kuswarno¹⁴ menekankan pentingnya memahami pengalaman subjektif dalam komunikasi melalui pendekatan fenomenologi. Kajian mengenai masyarakat adat oleh Li dan Acciaioli¹⁵ juga menunjukkan bahwa identitas dan otoritas lokal memiliki peran penting dalam membentuk struktur sosial masyarakat.

⁸ Schutz, *The Phenomenology of the Social World*.

⁹ Littlejohn and Foss, *Theories of Human Communication*; Kuswarno, *Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi*, 2009.

¹⁰ Carey, *Communication as Culture: Essays on Media and Society*.

¹¹ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*.

¹² Kuswarno, *Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi*, 2011.

¹³ Butt, "Papuan Papuans? The Politics of Identity and Affirmative Action in Papua."

¹⁴ Kuswarno, *Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi*, 2011.

¹⁵ Li, "Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot"; Acciaioli, "Grounds of Conflict, Idioms of Harmony."

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek struktural, kebijakan, atau budaya secara umum, dan belum secara spesifik mengkaji pengalaman komunikasi pemimpin adat dalam proses penetapan status OAP. Padahal, pemimpin adat memiliki peran strategis sebagai aktor utama dalam proses komunikasi yang menentukan legitimasi identitas individu. Kekosongan kajian ini menunjukkan adanya celah penelitian (research gap), khususnya dalam perspektif fenomenologi komunikasi yang menempatkan pengalaman subjektif sebagai pusat analisis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengalaman komunikasi pemimpin adat dalam penetapan status Orang Asli Papua di Kampung Gamta, Raja Ampat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian komunikasi, khususnya dalam perspektif fenomenologi komunikasi, serta kontribusi praktis dalam memperkuat peran lembaga adat dalam menjaga legitimasi identitas masyarakat Papua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif fenomenologi untuk memahami secara mendalam pengalaman komunikasi pemimpin adat dalam penetapan status Orang Asli Papua (OAP) di Kampung Gamta, Raja Ampat. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna subjektif dan realitas sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.¹⁶ Sementara itu, pendekatan fenomenologi digunakan untuk mengungkap pengalaman hidup (lived experience) individu dalam praktik komunikasi adat, sehingga memungkinkan peneliti memahami esensi pengalaman yang dialami oleh informan.¹⁷

Penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Jojau Gamta sebagai institusi adat yang memiliki kewenangan dalam penetapan status OAP di Kampung Gamta. Subjek penelitian terdiri dari informan utama dan informan pendukung. Informan utama dalam penelitian ini adalah pemimpin adat, yaitu Ahmad Wihel, yang memiliki otoritas utama dalam proses penetapan status OAP. Sementara itu, informan pendukung terdiri dari pengurus lembaga adat dan masyarakat Kampung Gamta, yaitu Ismail Wihel selaku wakil pemimpin adat, Abusaleh Alqadry selaku sekretaris lembaga adat, serta masyarakat yang terlibat dalam proses penetapan status OAP, yaitu Saleh Wihel, Said Wihel, dan Abdul Manaf Wihel. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam praktik komunikasi adat terkait penetapan status OAP.¹⁸

¹⁶ Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

¹⁷ Schutz, *The Phenomenology of the Social World*; Kuswarno, *Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi*, 2009.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman subjektif informan terkait praktik komunikasi adat, termasuk proses musyawarah, pertimbangan genealogis, serta dinamika interaksi yang terjadi.¹⁹ Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati secara langsung proses komunikasi dalam forum adat di lingkungan LMA Jojau Gamta, sehingga peneliti dapat memahami situasi sosial dan interaksi yang berlangsung secara natural. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, catatan, serta bukti administratif yang berkaitan dengan penetapan status OAP.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang meliputi tahapan reduksi fenomenologis, penyusunan makna, dan penarikan esensi pengalaman. Pada tahap reduksi fenomenologis, peneliti melakukan penyaringan terhadap data untuk mengidentifikasi pengalaman-pengalaman penting yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data diorganisasi ke dalam tema-tema makna untuk menemukan pola pengalaman komunikasi yang dialami oleh pemimpin adat. Tahap akhir dilakukan dengan merumuskan esensi pengalaman sebagai bentuk pemahaman mendalam terhadap fenomena komunikasi adat dalam penetapan status OAP.²⁰

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari informan utama dan informan pendukung, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.²¹ Selain itu, peneliti juga melakukan member check kepada informan untuk memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan pengalaman yang dimaksudkan oleh informan.

Dengan pendekatan dan prosedur tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengalaman komunikasi pemimpin adat dalam penetapan status OAP, khususnya dalam konteks Lembaga Masyarakat Adat Jojau Gamta di Kampung Gamta, Raja Ampat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengalaman Komunikasi Pemimpin Adat dalam Penetapan Status OAP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin adat memiliki otoritas penuh dalam proses penetapan status Orang Asli Papua (OAP) di Kampung Gamta. Ahmad Wihel sebagai pemimpin adat tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai aktor utama dalam

¹⁹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2018.

²⁰ Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

²¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2017.

proses komunikasi adat yang menentukan legitimasi identitas masyarakat. Proses komunikasi tersebut berlangsung dalam forum musyawarah adat, namun secara substantif keputusan akhir tetap berada pada pemimpin adat setelah melalui serangkaian pertimbangan yang bersifat kultural dan genealogis. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menekankan bahwa dalam masyarakat adat, otoritas simbolik pemimpin lokal memiliki peran dominan dalam proses pengambilan keputusan berbasis komunitas.²²

Dalam praktiknya, komunikasi yang dilakukan oleh Ahmad Wihel tidak bersifat administratif formal, melainkan berlangsung secara dialogis dan interpretatif. Ia menegaskan bahwa penetapan status harus didasarkan pada kejelasan asal-usul keluarga yang diketahui secara kolektif oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi adat berfungsi sebagai mekanisme verifikasi sosial yang tidak hanya bergantung pada data tertulis, tetapi juga pada ingatan kolektif dan pengalaman sosial. Temuan ini juga diperkuat oleh pandangan masyarakat Kampung Gamta yang menilai bahwa penentuan status OAP harus melalui proses yang ketat dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Dalam konteks komunikasi budaya, praktik semacam ini menunjukkan bahwa makna sosial dibangun melalui interaksi dan pengalaman kolektif.²³

Dalam perspektif fenomenologi, pengalaman komunikasi tersebut mencerminkan proses pemaknaan subjektif yang berakar pada pengalaman hidup individu. Schutz²⁴ menjelaskan bahwa tindakan sosial dibentuk oleh makna yang diberikan individu terhadap realitas yang dihadapinya. Dalam konteks ini, Ahmad Wihel secara aktif menafsirkan dan mengevaluasi informasi berdasarkan pengalaman, pengetahuan genealogis, serta nilai-nilai budaya yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan Kuswarno²⁵ yang menegaskan bahwa komunikasi dalam perspektif fenomenologi merupakan proses interpretatif yang melibatkan kesadaran individu dalam memahami realitas sosial. Penelitian dalam kajian komunikasi juga menunjukkan bahwa pengalaman subjektif menjadi dasar penting dalam membentuk tindakan komunikasi dalam konteks sosial tertentu.²⁶

Dominasi Pengetahuan Genealogis dalam Proses Komunikasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan genealogis menjadi dasar utama dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin adat. Ahmad Wihel menggunakan informasi mengenai garis keturunan sebagai acuan utama dalam menentukan keabsahan status OAP. Proses ini tidak hanya melibatkan pengumpulan informasi, tetapi juga interpretasi terhadap

²² Tsing, "Mixed Signals in the Commons"; Li, "Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot."

²³ Carey, *Communication as Culture: Essays on Media and Society*; Couldry, *Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice*.

²⁴ Schutz, *The Phenomenology of the Social World*.

²⁵ Kuswarno, *Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi*, 2011.

²⁶ Craig, "Communication Theory as a Field."

hubungan kekerabatan dalam masyarakat. Temuan ini menguatkan studi antropologi yang menunjukkan bahwa genealogis merupakan instrumen utama dalam menjaga struktur sosial masyarakat adat.²⁷

Dalam praktiknya, komunikasi mengenai genealogis dilakukan melalui proses eksplorasi yang mendalam, seperti penelusuran hubungan keluarga dan klarifikasi terhadap asal-usul individu. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi adat bersifat aktif dan investigatif. Temuan ini diperkuat oleh pernyataan masyarakat yang menyebutkan bahwa pemimpin adat memiliki pengetahuan yang luas mengenai silsilah keluarga, sehingga keputusan yang diambil dianggap tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara adat. Dalam konteks ini, pengetahuan lokal menjadi sumber legitimasi yang tidak dapat digantikan oleh sistem administratif formal.²⁸

Temuan ini sejalan dengan pandangan Koentjaraningrat²⁹ yang menyatakan bahwa sistem kekerabatan memiliki fungsi penting dalam menjaga identitas sosial dalam masyarakat tradisional. Selain itu, Geertz³⁰ menekankan bahwa budaya merupakan sistem makna yang diwariskan secara simbolik. Dengan demikian, pengetahuan genealogis tidak hanya berfungsi sebagai informasi faktual, tetapi juga sebagai representasi simbolik dari identitas kultural masyarakat.

Komunikasi Adat sebagai Proses Konstruksi dan Legitimasi Identitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi adat berperan sebagai mekanisme utama dalam membangun legitimasi status OAP. Legitimasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh fakta objektif, tetapi juga oleh proses komunikasi yang melibatkan interpretasi dan pengambilan keputusan oleh pemimpin adat. Dalam hal ini, komunikasi menjadi medium utama dalam membentuk kesepakatan sosial mengenai keabsahan identitas seseorang. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa legitimasi sosial dalam masyarakat adat terbentuk melalui proses komunikasi dan pengakuan kolektif.³¹

Ahmad Wihel menegaskan bahwa keputusan yang telah ditetapkan melalui mekanisme adat harus dihormati oleh seluruh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi adat memiliki kekuatan normatif yang mengikat. Temuan ini juga diperkuat oleh masyarakat yang menyatakan bahwa keputusan pemimpin adat bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat, sehingga seluruh

²⁷ Fox, "Place and Landscape in Comparative Austronesian Perspective"; Acciaioli, "Grounds of Conflict, Idioms of Harmony."

²⁸ Bebbington and others, "Mining and Social Movements: Struggles over Livelihood and Rural Territorial Development in the Andes."

²⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*.

³⁰ Geertz, *The Interpretation of Cultures*.

³¹ Duncan, *Violence and Vengeance: Religious Conflict and Its Aftermath in Eastern Indonesia*.

anggota komunitas wajib menerimanya. Dalam konteks ini, komunikasi berfungsi sebagai alat legitimasi sosial yang memperkuat struktur kekuasaan lokal.³²

Dalam perspektif konstruksi sosial, Berger dan Luckmann³³ menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses interaksi yang menghasilkan kesepakatan bersama. Dengan demikian, legitimasi status OAP merupakan hasil dari proses konstruksi sosial yang berlangsung melalui komunikasi adat, yang mengintegrasikan pengetahuan genealogis, otoritas adat, dan nilai-nilai budaya.

Penguatan Otoritas Pemimpin Adat dalam Praktik Komunikasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik komunikasi dalam penetapan status OAP berkontribusi terhadap penguatan otoritas pemimpin adat. Ahmad Wihel dipandang sebagai figur yang memiliki kewenangan penuh dalam menentukan keabsahan identitas masyarakat, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki legitimasi yang tinggi. Dalam konteks kepemimpinan lokal, otoritas semacam ini sering kali dibangun melalui interaksi simbolik dan pengalaman sosial yang berulang.³⁴

Otoritas tersebut tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga dibangun melalui pengalaman komunikasi yang berlangsung secara berkelanjutan. Dalam perspektif fenomenologi, otoritas ini terbentuk melalui pengalaman intersubjektif antara pemimpin adat dan masyarakat.³⁵ Kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin adat diperkuat oleh pengalaman komunikasi yang konsisten, sehingga menghasilkan legitimasi yang kuat. Hal ini juga didukung oleh pandangan masyarakat yang menilai bahwa pemimpin adat adalah pihak yang paling memahami aturan dan nilai adat yang berlaku.

Temuan ini sejalan dengan Littlejohn dan Foss³⁶ yang menyatakan bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam membentuk dan mempertahankan struktur sosial. Dalam konteks ini, praktik komunikasi adat tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai mekanisme yang memperkuat posisi dan otoritas pemimpin adat dalam masyarakat.

Makna Komunikasi Adat dalam Menjaga Kohesi Sosial

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi adat dalam penetapan status OAP memiliki makna yang lebih luas, yaitu sebagai upaya menjaga kohesi sosial dan keberlanjutan nilai-nilai budaya. Proses komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin adat tidak

³² Tsing, "Mixed Signals in the Commons."

³³ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*.

³⁴ Li, "Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot."

³⁵ Schutz, *The Phenomenology of the Social World*.

³⁶ Littlejohn and Foss, *Theories of Human Communication*.

hanya bertujuan untuk menentukan status, tetapi juga untuk memastikan bahwa identitas yang diakui tetap selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa komunikasi budaya berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial dalam komunitas lokal.³⁷

Dalam perspektif fenomenologi komunikasi, makna ini muncul dari pengalaman subjektif pemimpin adat dalam menjalankan perannya. Pengalaman tersebut membentuk cara pandang dan tindakan pemimpin adat dalam proses komunikasi, sehingga menghasilkan praktik komunikasi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga simbolik dan kultural. Temuan ini juga diperkuat oleh masyarakat yang memandang bahwa proses adat tidak hanya menentukan status, tetapi juga menjaga keharmonisan dan keteraturan sosial dalam komunitas.

Dengan demikian, komunikasi adat dalam penetapan status OAP dapat dipahami sebagai praktik sosial yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya berkaitan dengan verifikasi identitas, tetapi juga dengan konstruksi makna, legitimasi sosial, dan keberlanjutan budaya dalam masyarakat Papua.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemimpin adat memiliki peran sentral sekaligus otoritas penuh dalam proses penetapan status Orang Asli Papua (OAP) di Kampung Gamta, Raja Ampat. Komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin adat tidak bersifat administratif semata, melainkan merupakan praktik sosial yang bersifat interpretatif, dialogis, dan berbasis pada nilai-nilai budaya. Dalam proses tersebut, pengetahuan genealogis menjadi landasan utama dalam memverifikasi identitas, yang tidak hanya dipahami sebagai data faktual, tetapi juga sebagai representasi simbolik dari identitas kultural masyarakat.

Dalam perspektif fenomenologi komunikasi, pengalaman pemimpin adat dalam proses penetapan status OAP menunjukkan bahwa komunikasi berfungsi sebagai mekanisme pemaknaan subjektif yang membentuk legitimasi sosial. Legitimasi tersebut tidak hanya dihasilkan melalui fakta objektif, tetapi juga melalui proses komunikasi yang melibatkan interpretasi, pengalaman, dan kesepakatan sosial. Dengan demikian, komunikasi adat berperan sebagai medium utama dalam konstruksi realitas sosial terkait identitas OAP.

Temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa praktik komunikasi adat berkontribusi terhadap penguatan otoritas pemimpin adat serta menjaga kohesi sosial dalam masyarakat. Keputusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki kekuatan normatif, tetapi juga diterima secara kolektif sebagai bentuk legitimasi yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi adat memiliki

³⁷ Couldry, *Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice*.

fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan antara identitas kultural, struktur sosial, dan nilai-nilai budaya.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian fenomenologi komunikasi dengan menempatkan pengalaman komunikasi pemimpin adat sebagai pusat analisis dalam konteks masyarakat adat. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi penting bagi penguatan peran lembaga adat dalam proses penetapan status OAP, serta menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan yang lebih kontekstual dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal di Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Acciaoli, Greg. "Grounds of Conflict, Idioms of Harmony." *Indonesia*, no. 72 (2001): 81–114.
- Bebbington, Anthony, and others. "Mining and Social Movements: Struggles over Livelihood and Rural Territorial Development in the Andes." *World Development* 36, no. 12 (2019): 2888–2905.
- Berger, Peter L, and Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Anchor Books, 1966.
- Butt, Leslie. "Papuan Papuans? The Politics of Identity and Affirmative Action in Papua." *Asia Pacific Journal of Anthropology* 15, no. 3 (2014): 244–61.
- Carey, James W. *Communication as Culture: Essays on Media and Society*. New York: Routledge, 2009.
- Couldry, Nick. *Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice*. Cambridge: Polity Press, 2012.
- Craig, Robert T. "Communication Theory as a Field." In *The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy*, edited by Klaus Bruhn Jensen and Robert T Craig. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2016.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.
- Davidson, Jamie S. "Politics-as-Usual on Trial: Regional Anti-Corruption Campaigns in Indonesia." *The Pacific Review* 20, no. 1 (2007): 75–99.
- Duncan, Christopher R. *Violence and Vengeance: Religious Conflict and Its Aftermath in Eastern Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 2015.
- Fox, James J. "Place and Landscape in Comparative Austronesian Perspective." In *The Poetic Power of Place*, edited by James J Fox. Canberra: ANU Press, 1997.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta, 2009.
- Kuswarno, E. *Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Li, Tania Murray. "Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot." *Comparative Studies in Society and History* 42, no. 1 (2000): 149–79.
- Littlejohn, Stephen W, and Karen A Foss. *Theories of Human Communication*. Illinois: Waveland Press, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Schutz, Alfred. *The Phenomenology of the Social World*. Illinois: Northwestern University Press, 1967. <https://www.nupress.northwestern.edu>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Timmer, Jaap. "A Brief Social and Political History of Papua, 1962–2004." In *Papua's Insecurity: State Failure in the Indonesian Periphery*, edited by Bobby Anderson. Washington, DC: East-West Center, 2007.
- Tsing, Anna Lowenhaupt. "Mixed Signals in the Commons." In *People, Plants, and Justice*, edited by Charles Zerner. New York: Columbia University Press, 1998.
- Widjojo, Muridan S, ed. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and*

Muhammad Sych Alqadry: Fenomenologi Komunikasi Pemimpin Adat dalam Penetapan Status Orang Asli Papua di Kampung Gamta Raja Ampat

Securing the Future. Jakarta: LIPI Press, 2009.

Widjojo, M. S., Elizabeth, A., Al Rahab, A., Pamungkas, C., & Dewi, R. ed. *Papua Road Map II: Dinamika Otonomi Khusus Papua*. Jakarta: LIPI Press, 2010.